

343 Peneliti UGM Masuk Daftar Ilmuwan Teratas Dunia 2022

YOGYAKARTA (IM) - Sebanyak 343 peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) masuk dalam daftar ilmuwan teratas dunia versi AD Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index) 2022. Secara keseluruhan, UGM menduduki peringkat pertama perguruan tinggi di Indonesia dalam perangkungan tersebut.

Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono mengapresiasi hasil yang diraih oleh UGM di AD Scientific Index. "Kita bersyukur dengan hasil ini yang menunjukkan kinerja baik dari seluruh civitas UGM. Hasil ini menunjukkan ilmuwan UGM semakin kompetitif secara global," ujar Panut, dilansir dari Antara, Kamis (27/1).

Panut menuturkan UGM akan terus meningkatkan publikasi hasil-hasil penelitiannya melalui berbagai jurnal ilmiah bereputasi dan berbagai media komunikasi lainnya. Selain itu, UGM juga berupaya agar hasil-hasil penelitian itu bisa dihilirkan menjadi produk-produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita berusaha agar dalam penelitian tidak hanya terfokus pada publikasi dan sitasi, tetapi hilirisasi hasil riset menjadi produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas merupakan hal yang harus terus dilakukan," katanya.

AD Scientific Index adalah sistem perangkungan dan sistem analisis berdasarkan performa ilmiah dan nilai tambah dari produktivitas ilmiah peneliti individu. AD Scientific Index juga memberikan perangkungan institusi berdasarkan karakteristik-karakteristik ilmiah atau peneliti dalam suatu afiliasi. Sumber data dari AD Scientific Index adalah Google Scholar dengan atribut-atribut seperti, total h-index, i10 index dan sitasi. Untuk masuk dalam penilaian maka peneliti minimal memiliki 300 sitasi. Misalnya ada peneliti yang mendapatkan h-index = 1 dengan 300 sitasi akan dimasukkan sedangkan peneliti lain dengan h-index 5 dan 30 sitasi atau h-index 10 dengan 100 sitasi akan dieksklusikan. ● pur



PENJUALAN PERNAK PERNIK IMLEK

IDN/ANTARA

Warga keturunan Tioanghoa melihat pernak-pernik imlek yang dijual di kawasan Pecinan Tangerang, Pasar Lama, Tangerang, Banten, Kamis (27/1). Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2573 kawasan pecinan dipenuhi dengan penjualan berbagai macam pernak-pernik untuk merayakan Imlek.

Kontribusi Ulama dalam Membangun Tatanan Masyarakat Diperlukan

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mendorong para ulama terus meningkatkan moderasi beragama sesuai prinsip Islam Wasathiyah. Ia optimistis moderasi dalam beragama bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan serta mencegah munculnya ekstremisme dan terorisme.

SERANG (IM) - Pengurus MUI atau Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten Periode 2021-2026 pimpinan Ketua Umum, KH Tb Hamdi Ma'ani, resmi dilantik oleh Ketua Umum MUI KH Miftachul Achyar di Pendopo

Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (26/1).

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai menghadiri pelantikan tersebut mengatakan, kontribusi ulama

dalam membangun tatanan masyarakat sangat diperlukan. "Jelas sekali MUI vital perannya dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pembangunan tatanan masyarakat," kata Andika dikutip dari laman Pemprov Banten, Kamis (27/1).

Menurut Andika, para ulama juga mempunyai peran penting dalam mencegah munculnya paham radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Pasalnya, paham ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. "Tugas MUI yang di dalamnya terdapat para ulama yaitu menjaga keutuhan NKRI dari bahaya-bahaya seperti radikalisme, ekstrimisme dan terorisme pada tataran

pemahaman tentu saja," paparnya.

Andika mendorong para ulama terus meningkatkan moderasi beragama sesuai prinsip Islam Wasathiyah. Ia optimistis moderasi dalam beragama bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan serta mencegah munculnya ekstremisme dan terorisme.

Lebih lanjut Andika menyebutkan MUI melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya diharapkan, dapat memberikan setiap porsi kemashlahatan untuk memberikan guidance atau panduan bagi umat. Andika menambahkan, MUI menemukan berbagai ormas keagamaan Islam di dalam satu forum.

Menurutnya, apabila tidak ada satu forum untuk memusyawarahkan berbagai masalah umat bisa jadi yang muncul. "Dalam konteks tersebut jelas sekali bahwa MUI adalah mitra strategis pemerintah," imbuhnya.

Untuk diketahui, KH Tb Hamdi Ma'ani yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Pandeglang terpilih sebagai ketua umum MUI Provinsi Banten menggantikan KH AM Romly pada Musyawarah Daerah V MUI Provinsi Banten pada Sabtu (4/12) tahun lalu di Graha Widya Bhakti Puspitek Serpong, Tangerang Selatan. ● yan

PDAM Tirta Multatuli Lebak Diminta Responsif Terhadap Pelayanan

LEBAK (IM) - Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meminta PDAM Tirta Multatuli lebih responsif, adaptif, kompetitif dan lebih kreatif dalam segala aspek pelayanan kepada masyarakat, mengingat PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak merupakan muka Pemerintah Daerah dalam pelayanan penyediaan air bersih/air minum. Itu mengungkapkannya hal itu pada Ekspose Laporan Kinerja Tahun 2021 dan RKAP Tahun 2022 yang digelar PDAM Tirta Multatuli di Aula Multatuli Setda Lebak, Rabu (26/1).

Turut hadir Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lebak. Iti menjelaskan beberapa aspek kekurangan yang ada di PDAM Tirta Multatuli bukan faktor kesenjangan, tetapi banyak hal yang menjadi penyebabnya, seperti bencana

alam, kerusakan perpompaan dan lain sebagainya. "Untuk itulah kewajiban kita bersama untuk sinergi dengan PDAM dalam membangun kebersamaan, agar PDAM dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan mengedepankan aspek pembinaan dan komunikasi serta bukan justifikasi," kata Iti seperti dilansir dari Antara, Kamis (27/1).

Untuk menunjang hal tersebut Bupati juga mengajak kepada Forkopimda Kabupaten Lebak untuk memberikan dukungan penuh kepada jajaran Direksi PDAM untuk menjaga momentum perbaikan yang sedang dilakukan, karena sensitivitas kebutuhan air masyarakat kadang diaplikasikan secara kontraproduktif dengan melakukan generalisasi atas kinerja PDAM. Iti juga berpesan kepada jajaran untuk terus meningkatkan kekompatan dalam kerja kolektif memberikan layanan kepada masyarakat dan senantiasa meneruskan perbaikan kinerja yang tengah

dilakukan, mengaktifkan Call Center di tiap-tiap cabang, manfaatkan media sosial untuk diseminasi informasi serta merespon cepat setiap keluhan pelanggan.

Sementara itu Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak Wawan Kuswanto menyampaikan bahwa saat ini PDAM Tirta Multatuli memiliki kurang lebih 33 ribu pelanggan aktif di Kabupaten Lebak.

Wawan mengatakan untuk mengatasi tingkat kekeruhan yang diatas 1.000 NTU, ke depan akan dilakukan penyesuaian debit air baku yang masuk di sistem pengolahan air dengan cara pengaturan Valve air baku dalam keadaan tertentu atau pada saat banjir dikendalikan curah yang tinggi. "Air adalah kebutuhan nomor dua setelah udara, tak ada air kehidupan berakhir, maka dari itu kami akan senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih," kata Wawan. ● pur

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil Sosialisasi PTSL

BOGOR (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin mengikuti kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara virtual bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, di Ruang Rapat I Setda, Kamis (27/1). Kegiatan itu dalam rangka membantu menyelesaikan masalah pertanahan baik aset masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder supaya menjadi lebih tertib.

Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A. Djalil mengungkapkan, berbagai tantangan dan distorsi permasalahan pertanahan di daerah, untuk itu perlu peran pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN RI untuk terus memperbaiki pelayanan kepada seluruh daerah, sehingga mekanisme penyelesaian pertanahan di setiap daerah lebih baik lagi.

"Terima kasih dan apresiasi kepada kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang telah membekalkan BPHHTB untuk pendaftaran tanah pertama sehingga pengeluaran sertifikat bisa berjalan secara sangat baik dan cepat," ujarnya.

Sofyan menjelaskan, pihaknya sedang melakukan program desa lengkap di seluruh Indonesia dalam rangka menciptakan pendaftaran seluruh tanah secara lengkap. Saat ini sudah ribuan desa terutama di Jawa telah menjadi desa lengkap, artinya setiap persil tanah yang ada di desa tersebut sudah didaftarkan, dengan demikian batas desa jadi jelas, tidak ada lagi sengketa batas desa.

"32 Kabupaten/Kota termasuk Penda DKI telah melakukan desa lengkap secara house to house, berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN RI,

sehingga transaksi jual beli bisa dilaksanakan dengan waktu yang singkat, bahkan kita akan menuju ke elektronik. Untuk itu bagi daerah yang belum melakukan desa lengkap secara house to house, kami minta Bupati/Wali Kota bisa mendorong Bappenda di wilayahnya masing-masing agar mewajibkan melakukan house to house BPHHTB dengan kami," paparnya.

Lebih jauh Sofyan menyatakan, saat ini ia sangat serius ingin mendaftarkan aset-aset pemerintah daerah, sebab selama ini barangkali tidak terdaftar dengan baik sehingga banyak aset pemda yang hilang karena masalah administrasi. "Kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder supaya aset pertanahan menjadi lebih tertib," tukasnya. ● gio



Bupati Ade Yasin dan Sekda Kabupaten Bogor saat mengikuti acara virtual PTSL Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

DPRD Kota Tangerang Teken MoU Dengan Kejaksaan Negeri



DPRD Kota Tangerang Teken MoU Dengan Kejaksaan Negeri.

TANGERANG (IM) - Guna mencegah permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang.

MoU kedua lembaga tersebut dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu 26 Januari 2022.

"Ya kami mengajukan permohonan tanda tangan kerja sama khususnya terkait pelaksanaan usaha negara dan kita nantinya meminta kepada kesekretariatan DPRD Kota Tangerang agar lebih intensif dalam melakukan koordinasi konsultasi persoalan ketatanegaraan agar ke depan

tidak ada persoalan," papar Gatot usai melakukan MoU.

Menurut Gatot, dengan adanya kerja sama ini, pihaknya berharap bisa mencegah terjadinya permasalahan terkait pelaksanaan tata usaha negara terutama di Sekretariat DPRD Kota Tangerang.

"Jadi dengan MoU ini berharap ke depan tidak ada persoalan ketatausahaan negara," harap Gatot.

Sebab, menurutnya, dalam MoU itu DPRD Kota Tangerang dapat melakukan konsultasi maupun koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terkait pelaksanaan ketatausahaan negara.

"Ke depan pasti ada persoalan-persoalan, maka di tahun 2022 ini saya berkonsultasi dengan Kajari agar kiranya berkenan, kaitan ketatausahaan negara agar mungkin tidak keliru," tuturnya.

Sementara, Kepala Kejaka-

saan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda menjelaskan, nota kesepahaman bersama dengan DPRD Kota Tangerang bertujuan untuk saling memberikan dukungan dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal.

"Jadi pada intinya ini untuk menyukseskan berbagai kegiatan di DPRD apabila memang nanti dibutuhkan konsultasi adanya suatu pertimbangan hukum atau bantuan hukum dari kejaksaan," jelasnya.

Sebelum dengan DPRD Kota Tangerang, kata Erich, pihaknya juga telah melakukan kerja sama serupa dengan BUMN PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Soekarno-Hatta.

"Harapan kita bisa membantu memberikan dukungan untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik, dan pencapaian kinerja yang optimal untuk kepentingan masyarakat luas," tutupnya. ● adv


PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA MANTA DANA KAS

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA MANTA DANA KAS dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ('KIK') dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA MANTA DANA KAS sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan yang semula "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)" menjadi "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)";
- perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang semula "batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi";
- perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang semula "tidak ada" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan/pengalihan investasi"; dan
- perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula "Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi yang ditetapkan" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi".

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA MANTA DANA KAS serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA  

Jakarta, 28 Januari 2022
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan